



## Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau Tahun 2017-2020

Lia hanifa<sup>1\*</sup>, Kamarudin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

\*Korespondensi: [ipa.hanifa@gmail.com](mailto:ipa.hanifa@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima 30 April  
2022

Disetujui 22 Mei  
2022

Dipublikasikan 26  
Mei 2022

Keywords:  
Kinerja Anggaran  
Belanja; Analisis;  
Pamong Praja

© 2022 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja anggaran belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau Tahun 2017-2020. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah, observasi, dokumentasi, studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Kinerja anggaran belanja tahun 2017 adalah belanja operasi 89,77 %, tahun 2018 adalah 85,51 %, tahun 2019 adalah 88,84 %, tahun 2020 adalah 97,95 % yang berarti penggunaan belanja operasi tahun 2-17-20200 lebih dioptimalkan dalam penggunaan belanja daerah. Belanja modal terhadap total belanja tahun 2017 adalah 5,20 %, tahun 2018 adalah 8,24 %, tahun 2019 adalah 1,73 %, tahun 2020 adalah 0,49 %. Belanja modal tahun 2017-2020 menunjukkan keserasian belanja. Rasio efisiensi belanja tahun 2017 adalah 94,97 %, tahun 2018 adalah 95,69 %, tahun 2019 adalah 104,15 %, tahun 2020 adalah 98,44 % yang berarti efisiensi belanja tahun 2017-2020 masih kurang efisien dan pada tahun 2019 sangat tidak efisien.

### Abstract

The purpose of this study was to determine the performance of the budget at the Baubau City Civil Service Police Unit Office in 2017-2020. The techniques used in this research are observation, documentation, and literature study. While the data analysis technique used is descriptive quantitative. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: The performance of the 2017 budget is operating expenditure 89.77%, in 2018 it is 85.51%, in 2019 is 88.84%, in 2020 is 97.95% which means the use of operating expenditure years 2-17-20200 more optimized in the use of regional spending. Capital expenditure to total expenditure in 2017 was 5.20%, in 2018 it was 8.24%, in 2019 it was 1.73%, in 2020 it was 0.49%. The 2017-2020 capital expenditures show the compatibility of spending. The ratio of spending efficiency in 2017 is 94.97%, in 2018 is 95.69%, in 2019 is 104.15%, in 2020 is 98.44% which means that spending efficiency in 2017-2020 is still less efficient and in 2019 it is very inefficient. .

## 1. Pendahuluan

Kinerja anggaran pemerintah baik pusat, propinsi maupun kabupaten dan kota tidak terlepas dari unit satuan kerja yang terdapat di dalamnya sebagai pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan pelayanan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja sangat memegang peranan penting dalam organisasi perangkat daerah karena dapat menunjukkan bagaimana pengelolaan anggaran yang digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Kinerja pemerintah daerah lebih ditekankan pada kemampuan satuan unit kerja perangkat daerah melakukan penggunaan anggaran dengan baik untuk melaksanakan berbagai Program dan Kegiatan pembangunan yang akan dinikmati oleh masyarakat (Fajar Nugroho & Abdul Rohman, 2012).

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa, pengukuran kinerja dilakukan dengan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang akan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) 5 (lima) tahun yang direncanakan dalam rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang bersumber dari alokasi dana umum, alokasi dana khusus maupun pendapatan asli daerah. Setiap tahun pemerintah daerah harus melakukan persiapan anggaran yang akan digunakan dalam tahun berjalan untuk membiayai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Menurut Rahayu dan Rachman (2013:5), anggaran merupakan alat bagi manajemen yang memegang peranan penting dalam system pengendalian manajemen suatu perusahaan, terutama dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Satuan Polisi Pamong Praja yang diselenggarakan untuk kepentingan umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu organisasi pemerintah yang melaksanakan peraturan daerah, dengan anggota atau pejabat Satuan Polisi Pamong Praja yang berkewajiban menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Salah satu kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mengkoordinir laporan, pelaksanaan, budaya kerja Satpol PP, Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Keuangan, dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD berfungsi sebagai pedoman penyusunan RKA bagi SKPD yang merupakan bahan penyusuna Kota Baubau. Tujuan penyusunan RKA SKPD Anggaran adalah untuk menyamakan kedudukan dalam penyusunan dan perencanaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan.

Fenomena berdasarkan pengamatan penulis mengenai kinerja anggaran khususnya bidang penegakan peraturan daerah (Perda) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau yakni selama ini masih belum maksimalnya anggaran

yang digunakan pada bidang yang langsung bersentuhan dengan kegiatan masyarakat terutama bidang penegakan peraturan daerah yang memiliki tugas untuk melakukan penegakan peraturan daerah seperti pengawasan minuman keras, pemasangan baliho atau papan reklame yang tidak sesuai peruntukannya, serta penertiban pedagang kaki lima. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam kegiatan penegakan peraturan daerah untuk membiayai keperluan belanja operasional sehingga dapat mencapai kinerja yang baik karena pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik jika tidak didukung anggaran yang cukup.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kinerja anggaran belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau.

## **2. Metode penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja anggaran belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2017-2020. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data yang akurat.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif sebagai berikut :

### **a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja**

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah yaitu 60 – 90 persen (Sudarso, et al., 2018)

### **b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja**

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

### **c. Rasio Efisiensi Belanja**

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghemahatan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran,

### 3. Hasil

#### 3.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2020

**Tabel 1.** Realisasi Anggaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau Tahun 2017-2020

No	Program dan kegiatan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran
1	Belanja tidak langsung	4,868,268,163	5.304.815.000	4.034.211.279	4.538.787.604	4.253.105.834	4.380.767.935	4.484.083.179	4.588.965.651
2	Belanja langsung Program pelayanan administrasi perkantoran	2,000,913,735	2.038.963.500	2.559.703.663	2.582.988.500	2.695.420.325	2.822.073.515	2.412.661.580	2.446.421.944
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	523,040,600	526.425.000	950.919.450	1.035.405.000	532.563.000	550.478.985	299.019.648	299.983.985
4	program peningkatan disiplin aparatur	301,401,000	306.300.000	269.577.600	290.700.000	605.309.000	740.532.000	9.000.000	9.000.000
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	127,857,216	130.000.000	74.671.674	75.000.000	199.999.936	200.000.000	10.124.000	10.124.000
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	78,161,178	78.300.000	39.940.906	40.000.000	92.024.250	93.038.200	108.710.550	112.166.950
7	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan	904,363,000	906.785.000	1.539.190.000	1.548.665.000	1.731.104.200	1.742.074.100	1.421.402.500	1.421.411.360
8	Program pemeliharaan kantratribmas	428,949,000	430.700.000	186.345.000	186.345.000	249.365.000	264.644.500	138.353.264	138.426.319
Total		9,722,268,500	9.232.953.892	9.854.559.572	10.297.891.404	10.671.315.345	11.114.117.935	9.033.118.721	9.176.415.009

#### 3.2 Analisis Kinerja Belanja Tahun 2017-2020

Analisis kinerja belanja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2017-2020 sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

##### a. Analisis kinerja belanja tahun 2017

Belanja operasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2017 adalah jenis belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan pegawai berupa gaji, honorarium, dan belanja barang jasa berupa barang pakai habis. Jumlah belanja operasi tahun 2017 adalah Rp. 505.331.900,-, sedangkan jumlah belanja tahun 2017 Rp. 9.772.268.500,-. Rasio belanja operasi terhadap total belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2017 adalah 89,77 % yang berarti sangat serasi dan penggunaan belanja daerah lebih dioptimalkan untuk kegiatan belanja operasi.

Analisis belanja modal terhadap total belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau ukuran perbandingan antara realisasi belanja modal dan total belanja daerah. Anggaran belanja modal tahun 2017 Rp. 505.333.900,-, sedangkan total belanja daerah adalah Rp. 9.722.268.500,-. Rasio belanja modal

dengan membandingkan realisasi belanja modal dengan total belanja daerah tahun 2017 adalah 5,20 % yang berarti penilaian belanja modal terhadap total belanja tahun 2017 adalah cukup serasi dan berarti anggaran belanja daerah tidak dioptimalkan untuk kegiatan belanja modal.

Rasio efisiensi belanja tahun 2017 adalah perbandingan antara realisasi anggaran dan anggaran belanja. Anggaran belanja tahun 2017 Rp. 9.722.268.500,-, sedangkan realisasi anggaran belanja Rp. 9.232.953.892,-. Rasio efisiensi belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2017 adalah 94,97 %. Berdasarkan kriteria efisiensi kinerja belanja tahun 2017 efisien yang berarti Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2017 dalam menggunakan anggaran belanja tahun 2017 sudah dapat melakukan efisiensi belanja yang dimiliki.

#### b. Analisis Kinerja Belanja Tahun 2018

Belanja operasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2018 adalah jenis belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan pegawai berupa gaji, honorarium, dan belanja barang jasa berupa barang pakai habis. Jumlah realisasi belanja operasi tahun 2018 adalah Rp. 8.805.616.472,-, sedangkan total belanja tahun 2018 Rp. 10.297.891.404,-. Rasio belanja operasi terhadap total belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2018 adalah 85,51 % yang berarti berdasarkan pedoman keserasian belanja maka belanja operasi sangat serasi dan penggunaan belanja daerah lebih dioptimalkan untuk kegiatan belanja operasi. Analisis belanja modal terhadap total belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau ukuran perbandingan antara realisasi belanja modal dan total belanja daerah. Realisasi belanja modal tahun 2018 Rp. 848.943.100,-, sedangkan total belanja daerah adalah Rp. 10.297.891.404,-.

Rasio belanja modal dengan membandingkan realisasi belanja modal dengan total belanja daerah tahun 2018 adalah 8,24 % yang berarti tingkat keserasian rasio belanja tahun 2018 adalah sangat serasi yaitu penggunaan anggaran untuk kegiatan belanja daerah tidak dioptimalkan untuk kegiatan belanja modal. Rasio efisiensi belanja tahun 2018 adalah perbandingan antara realisasi anggaran dan anggaran belanja. Anggaran belanja tahun 2018 Rp. 10.297.891.404,-, sedangkan realisasi anggaran belanja Rp. 9.854.559.572,-. Rasio efisiensi belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2018 adalah 95,69 %. Berdasarkan kriteria efisiensi kinerja belanja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2018 dalam menyeimbangkan realisasi dan target belanja sudah efisien yang berarti Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2018 dalam merealisasikan anggaran dan target belanja tahun 2018 sudah efisien.

#### c. Analisis Kinerja Belanja Tahun 2019

Belanja operasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2019 adalah jenis belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan pegawai berupa gaji, honorarium, dan belanja barang jasa berupa barang pakai habis. Jumlah belanja operasi tahun 2019 adalah Rp. 9.874.054.345,-, sedangkan total belanja tahun 2019 Rp. 11.114.117.935,-. Rasio belanja operasi terhadap total belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2019 adalah 88,84 % yang berarti berdasarkan pedoman keserasian belanja maka penggunaan

belanja operasi dibandingkan dengan total belanja daerah sangat serasi dan penggunaan belanja daerah lebih dioptimalkan untuk kegiatan belanja operasi. Analisis belanja modal terhadap total belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau ukuran perbandingan antara realisasi belanja modal dan total belanja daerah. Anggaran belanja modal tahun 2019 Rp. 191.952.000,-, sedangkan total belanja daerah adalah Rp. 9.722.268.500,-. Rasio belanja modal tahun 2019 adalah 1,73 % yang berarti realisasi belanja modal dibandingkan dengan pendapatan asli daerah tidak serasi, hal ini menunjukkan . Penggunaan anggaran untuk kegiatan belanja modal tahun 2019 masih kurang jika dibandingkan dengan total belanja daerah

Rasio efisiensi belanja tahun 2019 adalah perbandingan antara realisasi anggaran dan anggaran belanja. Anggaran belanja tahun 2019 Rp. 11.114.117.935,-, sedangkan realisasi anggaran belanja Rp. 10.671.315.345,-. Rasio efisiensi belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2019 adalah 104,15 % yang berarti antara target anggaran dan realisasi anggaran tahun 2019 sudah efisien dalam penggunaan anggaran.

#### d. Analisis Kinerja Belanja Tahun 2020

Belanja operasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2017 adalah jenis belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan pegawai berupa gaji, honorarium, dan belanja barang jasa berupa barang pakai habis. Jumlah realisasi belanja operasi tahun 2020 adalah Rp. 8.988.269.721,-, sedangkan total belanja tahun 2020 Rp. 9.176.415.009,-. Rasio belanja operasi terhadap total belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2020 adalah 97,95 % yang berarti berdasarkan pedoman keserasian belanja maka belanja operasi sangat serasi dan penggunaan belanja daerah lebih dioptimalkan untuk kegiatan belanja operasi.

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan ukuran perbandingan antara realisasi belanja modal dan total belanja daerah. Realisasi anggaran belanja modal tahun 2020 Rp. 44.849.000,-, sedangkan total belanja daerah adalah Rp. 9.176.415.009,-. Rasio belanja modal dengan membandingkan realisasi belanja modal dengan total belanja daerah tahun 2020 adalah 0,49 % yang berarti realisasi belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah tahun 2020 tidak serasi.

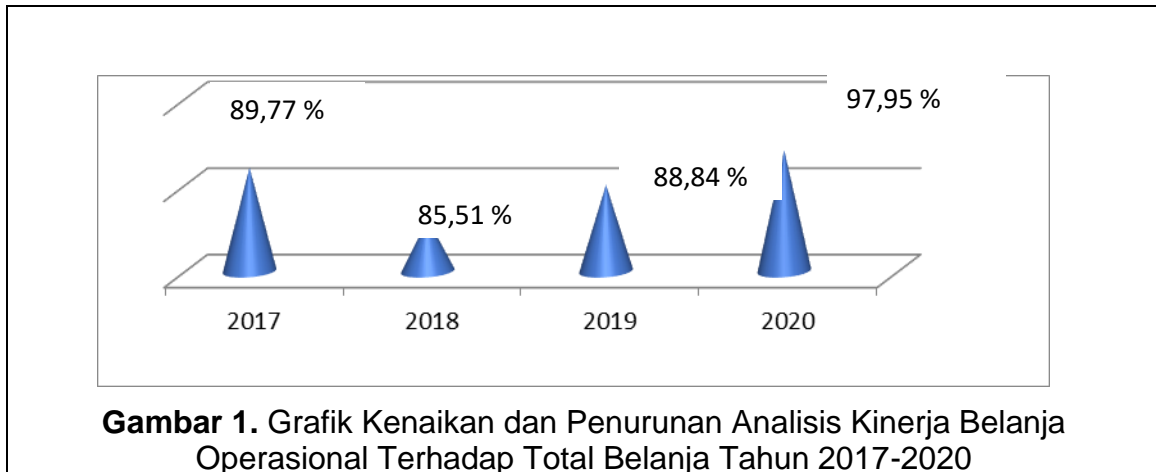
Rasio efisiensi belanja tahun 2020 adalah perbandingan antara realisasi anggaran dan anggaran belanja. Anggaran belanja tahun 2020 Rp. 11.114.117.935,-, sedangkan realisasi anggaran belanja Rp. 10.671.315.345,-. Rasio efisiensi belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2020 adalah 98,44 % Berdasarkan kriteria efisiensi kinerja belanja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau 2020 adalah efisien yang berarti Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau sudah melakukan efisiensi belanja antara realisasi belanja dan target belanja pada anggaran yang dimiliki.

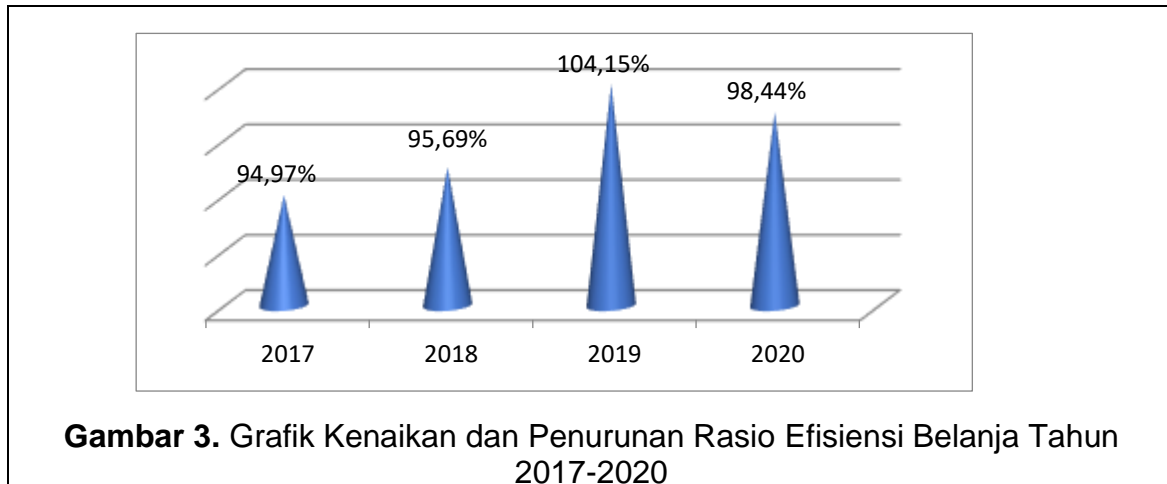
## 4. Pembahasan

Anggaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2017-2020 sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2011:61) yang menyatakan bahwa anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan

penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau 27 September 2021 "Terjadinya perbedaan belanja setiap tahun itu karena pada masing-masing tahun ada pos-pos anggaran yg lebih diutamakan dan juga masa pandemi ini membuat adanya peralihan anggaran ke bantuan-bantuan covid 19".

Berikut adalah perbedaan analisis Kinerja Belanja Operasional Terhadap Total Belanja Tahun 2017 – 2020 yang dapat dilihat melalui gambar dibawah ini :





Berdasarkan gambar diatas, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau sebaiknya meningkatkan anggaran dan realisasi belanja modal karena belanja moda dapat digunakan untuk jangka panjang dengan melakukan efisiensi pada belanja operasi bidang yang lebih membutuhkan seperti Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal sehingga dapat menciptakan suasana kota yang aman dan tentram bagi masyarakatnya sebagaimana teori yang disebutkan Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2012) bahwa Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarahkan manajemen untuk dapat menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ardyan Firdausi Mustoffa (2019), Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan pendapatan daerah varians rata-rata lebih dari 100%, pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata (positif) 12,15%, derajat desentralisasi rasio keuangan pendapatan kurang baik dengan nilai 14,40%, rasio ketergantungan daerah tinggi dengan nilai 85,06%, rasio efektifitas pajak nilai rata-rata 117,64%, kinerja keuangan varians belanja dibawah 100%, belanja daerah tumbuh 14,57%, penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk belanja operasi 83,74% memiliki perbandingan belanja modal 15,90% dan efisiensi belanja dibawah 100%. Selanjutnya Remy. R Palimbongan (2019), menunjukkan realisasi belanja yang telah dilakukan lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan, hasil positif dalam kinerja nggaran dengan demikian kinerja belanja dinilai baik, demikian juga penelitian Sakina Nusarifa Tantri dan Putri Irmawati (2018), Hasil penelitian menunjukkan Analisis pertumbuhan belanja berjalan baik, analisis keserasian belanja menunjukkan harmonisasi belanja daerah, efisiensi belanja tidak melebihi tidak melebihi realisasinya, namun terdapat salah satu program berjalan tidak efisien dan untuk hasil perhitungan dari rasio efektifitas dinas terkait sudah efektif menggunakan anggaran belanja tidak langsung

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Kinerja anggaran belanja adalah Belanja operasi terhadap total belanja 2017 adalah 89,77 %, tahun 2018 adalah 85,51 %, tahun 2019 adalah 88,84 %, tahun 2020 adalah 97,95 % yang berarti belanja operasi tahun 2017-2020 penggunaan belanja daerah lebih dioptimalkan untuk kegiatan operasi. Belanja modal terhadap total belanja tahun 2017 adalah 5,20 %, tahun 2018 adalah 8,24



%, tahun 2019 adalah 1,73 %, tahun 2020 adalah 0,49 %. Belanja modal tahun 2017-2020 menunjukkan keserasian belanja. Rasio efisiensi belanja tahun 2017 adalah 94,97 %, tahun 2018 adalah 95,69 %, tahun 2019 adalah 104, 15 %, tahun 2020 adalah 98,44 % yang berarti efisiensi belanja tahun 2017-2020 sudah efisien dan pada tahun 2020 sudah efisien.

### Daftar pustaka

- Mustoffa, A.(2019). *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi. Nomor ISSN (Cetak) 2528-5599. Nomor ISSN (Online) 2614-3291. Doi:10.32493 <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/keberlanjutan/article/view/2708>. Diakses 23 Maret 2021.
- Nordiawan, D & Hertianti, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Nugroho, F & Rohman, A. (2012). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Akuntansi Diponegoro, Volume 1. No. 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/38>. diakses 23 Maret 2021.
- Nusarifa, S & Irmawati, P. (2018). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016*. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 1. No 1 Hal 27-37 Maret 2018. <http://journal.umy.ac.id/index.php/jati>. diakses 23 Maret 2021
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. (2006) *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71. (2010). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29. (2014) *Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun. (2019). *Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020*.
- Palimbongan, R. (2019). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA. Vol.7 No.4 Juli 2019, Hal. 4888-4897 . ISSN 2303-1174 .<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/25444/25101>. Diakses, 23 Maret 2021
- Rahayu, S & Rachman, A. (2013). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sudaryo, et al. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik, Edisi I*. Andi. Yogyakarta.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/17042/perda-kota-bau-bau-no-4-tahun-2011>